**GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Surat Kabar** | **:** | **Kompas** | **Tgl/Bln/Thn** | **:** | **14 November 2007** |
| **Subyek** | **:** | **Pembalakan liar** | **Hari** | **:** | **Rabu** |
| | | | **Halaman** | **:** | **22** |


# Pembalakan Berlanjut

## TN Sebangau dan Kutai Rusak, TN Jambi Sudah Habis

Palangkaraya, Kompas - Pembalakan liar terus berlanjut di Taman Nasional Sebangau, Provinsi Kalimantan Tengah; Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur; serta di Provinsi Jambi.

Di TN Sebangau dan Taman Nasional Kutai (TNK), pembalakan liar dilakukan para pengusaha pertambangan, perkebunan, dan para perambah hutan. Sedangkan di Jambi—yang kondisi hutannya nyaris habis—pembalakan terjadi antara lain akibat birokrasi yang korup sejak perizinan, hingga penanganan kasus.

Direktur Eksekutif Institut Hukum Sumber Daya Alam (IHSA) Fathi Hanif, Senin (12/11) di Jambi, mengemukakan, temuan kayu ilegal di Indonesia sepanjang Januari-Mei tahun 2006 mencapai 385.580 meter kubik dari 349 kasus. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2007 menurun menjadi 79.477 meter kubik, dari 50 kasus.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran di Palangkaraya, kemarin, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kalteng berkomitmen untuk menjaga kelestarian hutan, dan karenanya pembukaan kawasan perkebunan harus dilakukan di lahan kosong atau lahan kritis.

Diran mengatakan, luasan revitalisasi perkebunan di Kalteng mencapai 579.000 hektar, terdiri atas 427.000 ha untuk sawit dan 152.000 ha untuk karet, dengan total investasi kredit perbankan yang akan dikucurkan hingga 2011 sebanyak Rp 14,1 triliun.

Namun menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng, pelepasan lahan untuk keperluan tambang, perkebunan, dan sektor lainnya hingga tahun 2006 di Kalteng sudah mencapai 1.559.441 hektar.

Pada periode 1980-2006, pemda di Kalteng sudah mengeluarkan izin pengembangan perkebunan kelapa sawit kepada 242 perusahaan dengan total luasan 2.780.219 hektar. Hingga tahun 2006, tercatat ada 23 perusahaan perkebunan di Kabupaten Seruyan yang masuk ke kawasan hutan produksi yang luasnya 346.188 hektar.

Oleh karenanya, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Satriadi menambahkan, dampak deforestasi atau kerusakan hutan, antara lain, tingginya intensitas banjir setiap tahun di hampir semua daerah aliran sungai.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalteng Mega Hariyanto mengatakan, berdasarkan pantauan menggunakan heli dari udara, di kawasan TN Sebangau ditemukan dua titik tumpukan kayu tebangan di sekitar Sungai Akah dan Sungai Kamipang, Kabupaten Katingan. Terlihat juga pondok di sekitar lokasi tersebut.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Namun, Kepala Balai TN Sebangau Drasospolino menuturkan belum dapat memastikan apakah di kawasan tersebut terjadi pembalakan liar. "Bisa jadi pondok tadi dibangun oleh warga yang ingin menyadap getah. Tumpukan kayu itu bisa jadi sisa kayu tebangan liar yang tidak dapat keluar karena muara sungai dijaga," katanya.

Drasospolino menuturkan, untuk mengeluarkan kayu tebangan liar dari lokasi itu sulit, karena mau tak mau harus melewati pos penjagaan yang dibangun di muara sungai, yang merupakan satu-satunya pintu keluar.

Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Kalaweit minggu ini rencananya akan diturunkan untuk memantau lewat darat titik temuan kayu di TN Sebangau itu. Saat ini di Kalteng ada 53 personel SPORC yang bertugas menjaga kawasan hutan

**Pelepasan lahan**

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Provinsi Kaltim Nusyirwan Ismail, Selasa (13/11) di Samarinda, mengatakan, pelepasan lahan atau enclave bisa memunculkan permintaan pelepasan lagi. Dia mencurigai ada kepentingan ekonomi di balik perambahan. Apalagi, selama ini, sudah telanjur diketahui bahwa tanah di kawasan konservasi seluas 198.600-an ha itu kaya kandungan batu bara berkalori tinggi. "Kalau enclave, nanti minta enclave terus, dan TNK akan lenyap," kata Nusyirwan.

Sebagai gambaran, sejak Mei 2007, 600-an ha hutan di TNK dirambah oleh sekitar 600 orang. Bahkan sejak tahun 2000, TNK pun dirambah. Kini di TNK bermukim 24.000 orang yang tersebar di tujuh desa dan satu kecamatan. Atas dasar ini, Pemerintah Kutim mengusulkan 24.000 ha TNK dilepas agar bisa menjadi milik masyarakat yang dulu perambah.

Nusyirwan menolak usulan itu, karena akan memicu orang lain datang dan merambah.

**Hutan habis di Jambi**

Di Jambi, penurunan kasus pembalakan liar kayu bukan semata disebabkan oleh gencarnya penanganan aparat hukum dalam melindungi kelestarian hutan. "Faktor utamanya, karena kayu dalam hutan sudah kian habis dibalak secara liar. Saat ini di Jambi orang mau mengambil kayu dalam hutan sangat sulit," kata Fathi Hanif dari IHSA.

Faktor lain penyebab sulitnya pemberantasan pembalakan liar, karena sering tidak samanya persepsi pembalakan liar, kurang tertatanya administrasi perizinan dalam pengelolaan hutan, dan lain-lain. (ITA/CAS/BRO)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP